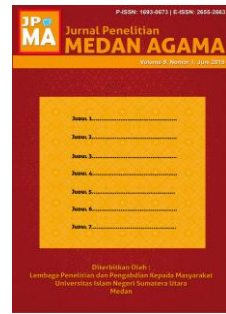


Implementing the Principle of Transparency to Realize Good Governance in Village Government

Implementasi Asas Keterbukaan untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Good Governance



Suriani*, Lalu Sumardi, Edy Kurniawansyah

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, Indonesia

Email: Any38711@gmail.com, Lalusumardi.fkip@unram, edykurniawansyah@gmail.com

Correspondence: Any38711@gmail.com

Abstract

The implementation of good governance is the goal of every government administrator, including in village government. An important aspect in realizing good governance is the existence of openness or transparency of the government to the community as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Good governance itself is a system of policy and institutional values that prioritizes openness. In line with that, based on the results of the study, the implementation of the principle of openness in Sukaraja Village has begun to be implemented, especially in terms of delivering development information and village financial management. However, there are still several obstacles such as lack of community participation and the lack of use of social media, these obstacles become challenges for the village government in implementing the principle of openness to realize good governance village government. This study uses a qualitative approach with a case study type with data collection techniques namely observation, interviews and documentation. In order to reduce misunderstandings from the community towards the Sukaraja village government, it is necessary to implement the principle of openness to realize good governance village government.

Keywords: Principle of transparency, good governance, village government

Abstrak

Penerapan tata pemerintahan yang baik menjadi tujuan setiap penyelenggara pemerintahan termasuk di pemerintahan desa. Aspek penting dalam mewujudkan good governance adalah adanya keterbukaan atau transparansi pemerintah ke masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. good governance sendiri merupakan suatu sistem nilai kebijakan dan kelembagaan yang mengedepankan sifat keterbukaan. Sejalan dengan itu berdasarkan hasil penelitian, bahwa implementasi asas keterbukaan di Desa Sukaraja sudah mulai dilaksanakan, terutama dalam hal penyampaian informasi pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Namun, masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya memanfaatkan media sosial, hambatan ini menjadi tantangan pemerintah desa dalam mengimplementasikan asas keterbukaan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang good governance. Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus

dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Agar mengurangi kesalahpahaman Masyarakat kepada pemerintahan desa sukaraja maka perlu pengimplementasian asas keterbukaan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang *good governance*.

Kata Kunci: Asas keterbukaan, Good Governance, Pemerintahan Desa

1. PENDAHULUAN

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 tentang desa menjelaskan Pemerintah desa merupakan entitas yang mengatur jalannya pemerintahan serta aktivitas masyarakat di suatu wilayah tertentu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berada di bawah pemerintahan kabupaten, pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa dengan dukungan beberapa perangkat desa untuk membantu dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam melayani masyarakat desa. Komitmennya terletak pada pengelolaan dan pengembangan sumber daya masyarakat, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, serta memajukan desa agar dapat mengemban pemerintahan yang efektif. Masyarakat bercita-cita agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, yang sering disebut sebagai *good governance*.

Good governance merupakan istilah yang tengah naik diperbincangkan kepublik dalam beberapa waktu dekade belakangan ini. *Governance* sendiri ialah suatu sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan dimana interaksi masyarakat, pemerintah, dan swasta lah yang memengaruhi dan mengelola urusan ekonomi, sosial, dan politik (Ayuningtyas, 2021).

Good governance merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia saat ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Selain adanya pengaruh globalisasi pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspons oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, pentingnya *good governance* bagi pemerintahan desa tidak hanya sebagai teori tata kelola yang ideal, tetapi sebagai kebutuhan praktis untuk mencapai pembangunan desa yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan (Sedarmayanti, 2003:4).

Keterbukaan atau transparansi harus ditegakkan dalam konteks kebebasan aliran informasi. Pemerintahan yang efektif akan memperlihatkan transparansi kepada warganya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip keterbukaan ini lebih terlihat pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, seperti pemerintahan desa, di mana implementasinya dapat diamati dengan lebih jelas dalam upaya mewujudkan tata kelola yang bersih. Asas keterbukaan menghendaki agar klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima informasi dan materi dari luar yang nantinya bagi pengembangan diri, sehingga kepala desa dapat melayani warganya dengan baik dan adil (Syafaruddin, 2019).

Implementasi asas keterbukaan di tingkat desa masih terdapat sejumlah kendala dalam penerapan konsep keterbukaan di tingkat desa. Berdasarkan penelitian (Fatmawati, 2018) masih terdapat kesenjangan antara peraturan yang mendorong transparansi dengan praktik nyata di lapangan, khususnya terkait pengambilan keputusan dan transparansi anggaran. Sebaliknya, (Putra, 2017) menemukan bahwa hambatan utama dalam mencapai transparansi di tingkat desa adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan terbatasnya infrastruktur teknologi informasi.

keterbukaan pemerintahan desa masih dijumpai kelemahan yang secara umum merupakan pelayanan informasi tentang pembuatan infrastruktur jalan baru dan kurang melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, oleh sebab itu pelayanan aparatur pemerintah desa terbilang masih belum berjalan efektif. Masalah utama dalam kasus seperti ini adalah kurang memberikan informasi terkait pembuatan infrastruktur baru dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembuatan infrastruktur jalan baru. Sebagai aparatur negara di tingkat pemerintah desa sudah sewajarnya memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada warga desanya agar pemerintahan desa dapat di sebut dengan pemerintahan desa *yang good governace*.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2020:9) penelitian kualitatif adalah metode yang berprinsipkan filsafat postpositivisme, yang dipakai untuk meneliti pada keadaan alamiah dari objek. Pada penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilaksanakan menggunakan triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), kemudian data yang didapatkan condong kepada data kualitatif, analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif ialah menginterpretasikan makna, menginterpretasikan keunikan, mengkonstruksi suatu peristiwa, dan memperoleh hipotesis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Yin (2018: 23) studi kasus adalah strategi yang cocok ketika pertanyaan penelitian berfokus pada how dan way, peneliti memiliki sedikit kontrol atas peristiwa yang akan diteliti, dan fokus penelitian berada pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata.

Selanjutnya, Yin (2011:1) menambahkan bahwa studi kasus merupakan metode penelitian empiris yang digunakan dalam menyelidiki fenomena dalam kehidupan nyata, dimana batas antara fenomena dan konteks tidak jelas, dan menggunakan berbagai sumber bukti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian bahwa ada 3 implementasi asas keterbukaan yang digunakan pemerintahan desa sukaraja untuk mewujudkan pemerintahan desa yang *good governance* yaitu 1) musyawarah, musyawarah merupakan forum tukar pikiran dan diskusi yang bertujuan mencari solusi terbaik atas suatu masalah secara bersama-sama, dengan mengedepankan kepentingan umum, keadilan, dan persaudaraan adapun musyawarah yang dilakukan tingkat desa setiap tahunnya yaitu musyawarah desa (MUSDES) dan musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDES), 2) pemajangan papan informasi dan banner, 3) pembuatan *website*.

1. Implementasi Dan Strategi Dalam Mengimplementasikan Asas Keterbukaan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang *Good Governance* Di Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

a. Musyawarah Desa Dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa



Gambar 1. Musyawarah Desa Dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

Pada musyawarah ini pemerintah desa melibatkan semua masyarakat untuk menghadiri agar mengetahui program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sukaraja untuk satu tahun kedepannya selain itu pemerintah desa juga memaparkan anggaran dana desa yang akan digunakan setiap tahunnya, sehingga tidak ada terjadinya kesalahpahaman masyarakat kepada pemerintah desa. Musyawarah ini juga waktunya fleksibel sehingga jika suatu saat terjadi masalah sosial yang tidak bisa diselesaikan secara sepihak maka pada musyawarah inilah yang akan menjadi tahap awal penyelesaian masalah sehingga mendapatkan kesepakatan bersama sesuai yang diinginkan.

b. Pemajangan Papan Informasi dan banner



Gambar 2 Pemajangan Papan Informasi dan Banner

Strategi ini cukup efektif dilakukan untuk membagi informasi kepada masyarakat desa sukaraja dikarenakan akses terhadap media digital masih terbatas, sehingga informasi yang disampaikan secara visual dan langsung di tempat umum lebih mudah diakses, dan dipahami oleh seluruh masyarakat desa sukaraja, termasuk yang tidak terbiasa dengan teknologi. Adapun beberapa banner yang sudah dipajang oleh pemerintah desa yaitu kegiatan-kegiatan pembangunan desa, penyaluran bantuan desa termasuk anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES).

c. Pembuatan Website



Gambar 3. Rancangan Pembuatan Website

Pada tahun ini pemerintah desa sukaraja sedang merancang *website* supaya masyarakat lebih mudah mengakses informasi tentang apa saja yang perlu dibawa ke kantor desa saat pembuatan surat dan mengetahui program-program pembangunan sekaligus anggaran dana yang digunakan oleh pemerintah desa.

2. Hambatan Pemerintah Desa dalam Mengimplementasikan Asas Keterbukaan untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa yang *Good Governance* di Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Hambatan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa dikarenakan tidak adanya saran dan masukan dari masyarakat sehingga menjadikan pemerintah desa tidak terlalu berkembang.

b. Kurangnya Pemanfaatan Media Sosial

Kurangnya memanfaatkan media sosial bukan semata pemerintah desa tidak pandai menggunakan media sosial akan tetapi pada saat pemerintah desa menyebarkan informasi lewat media sosial masyarakat desa sukaraja tidak membaca dan melihatnya masyarakat lebih menggunakan media sosial sebagai tempat mencari hiburan saja.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan pemerintah desa sukaraja dalam menerapkan asas keterbukaan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang *good governance* yaitu dengan melakukan musyawarah desa dan musyawarah rencana pembangunan desa, memajang papan informasi atau banner dan pembuatan *website* ketiga cara ini sangat efektif di terapkan untuk memberikan informasi di desa sukaraja yang masih terbilang desa terpencil yang

masih awam tentang teknologi. Adapun hambatan pemerintah desa sukaraja dalam mengimplementasikan asas keterbukaan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang *good governance* yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemanfaatan sosial media, dikarenakan kurangnya respon dan masukan dari masyarakat menjadikan pemerintah desa hanya memperbaiki masalah itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Afriani, D. (2023). *Pengaruh Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer, Komitmen Guru dan Motivasi Serta Etos Kerja Guru terhadap Peningkatan Kinerja Guru di SMA Negeri 2 Kuta Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Anshar, M. (2022). Peran Kepala Sekolah Sebagai Administrator Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Talaga Jaya. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 2095-2103.
- Azizah, Y., & Mustari, M. (2024). DAMPAK KEPEMIMPINAN KOLABORATIF KEPALA SEKOLAH PEREMPUAN TERHADAP PARTISIPASI GURU DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN: STUDI KASUS DI SDN 18 AMPENAN. *Jurnal Berajah*, 4 (8), 1573-1584.)
- Apriani, B. K., Handayani, R., & Mustari, M. (2025). Peran Kepala Sekolah dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengelolaan Arsip Digital di SDN 23 Ampenan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 210-217.)
- Arikunto, S. (1998). *Pendekatan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dono, B. E. (2021). *Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan prestasi siswa*. Guepedia.
- Fadli, A. (2017). Konsep Pendidikan Imam Al-Ghazali Dan Relevansinya Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia. *El-Hikam*, 10(2), 276-299.
- Fathurrohman, M., & Sulistyorini, M. F. (2012). *Belajar dan pembelajaran*. Yogyakarta: Teras.
- Fauzi, F. (2019). Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Dan Kedisiplinan Siswa. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 26-33.
- Fitri, Z. (2020). Peran kepala sekolah sebagai educator dan manager di Tkit Qurrata 'Ayun Bengkulu Selatan. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 14(3), 129-135.
- Fitriyanti, F., Haryati, S., & Zuhairi, A. (2022). Pengaruh supervisi kepala sekolah dan motivasi kerja terhadap kinerja guru sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 1243-1251.
- Hadi, S. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Pendidikan Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Hadi, S., & Alqadri, B. (2025). PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SMAN 9 MATARAM. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 307-320.)
- Haryanti, N., Hasanah, M. A., & Utami, S. (2022). Pengaruh Game Online Terhadap prestasi Belajar dan Motivasi Belajar Siswa MI Miftahul Huda Sendang Tulungagung. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 2(3), 131-138.
- Herianto, E., Kurniawansyah, E., & Mustari, M. (2024). STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN

- PENDIDIKAN BERKUALITAS UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SUSTAINBLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI SMAN 4 MATARAM. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 4390-4403.
- Imron, M. (2023). Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Motivasi Kinerja Guru. *Journal Creativity*, 1(1), 41-62.
- Iqbal, M. (2023). Analisis Posisi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *Inspirasi: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 20(2), 873-881.
- Jamilah, J., Warman, W., & Azainil, A. (2023). Peran Kepala Sekolah Sebagai Inovator Dan Motivator Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 55-60.
- Kamaludin, K. (2023). Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Perubahan Dalam Pemberdayaan Warga Sekolah. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 10(2), 249-258.
- Kebudayaan, D. P. D. Peran Kompetensi Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 4 Mojokerto.
- Khatimah, N. (2021). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Peserta Didik. *Proceeding: Islamic University of Kalimantan*.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Leimena, J. T., Zulaikha, S., & Santosa, H. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru Di SMK Negeri Kota Ambon Provinsi Maluku. *Visipena*, 11(2), 427-441.
- Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.
- Mahanani, D., Mustari, M., Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2023). Peran Kepala Sekolah dan Guru PPKn Dalam Implementasi Karakter Disiplin Siswa di SMPN 1 Kuripan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(2), 2810-2822.
- Nasional, D. P. (2003). Sistem pendidikan nasional. *Jakarta (ID): Depdiknas*.
- Nasution, W. N. (2016). Kepemimpinan pendidikan di sekolah. *Jurnal Tarbiyah*, 22(1).
- Putra, J. A. (2020). Peran Kepala Sekolah Sebagai Inovator di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pariaman. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 347-355.
- Robbins, S. P. (2009). *organisational behaviour in Southern Africa*. Pearson South Africa.
- Saleh, Y. Y. S. (2024). *Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru dan Prestasi Siswa di MAN Pacitan* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Sudjana, N. (2009). Penilaian hasil belajar mengajar. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif
- Supartilah, S., & Pardimin, P. (2021). Peran kepala sekolah di era revolusi industri 4.0 dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Media Manajemen Pendidikan*, 4(1), 138-149.
- Syahril, S. (2019). Teori-teori kepemimpinan. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 4(02), 208-215.
- Ulum, M. B. (2018). Urgensi supervisi pendidikan di sekolah. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 127-134.
- Wirtadipura, D. (2022). Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal)*, 3(1), 354-363.